



DAMPAK INFLASI DAN DEFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 2020–2024

THE IMPACT OF INFLATION AND DEFLATION ON INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH IN THE 2020–2024 PERIOD

Sefda Aulia¹, Juleha², Fahry Ganang Saputra³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: sefdaaulia04@gmail.com¹, julehabae118@gmail.com², fganangsaputra@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 11-11-2025

Revised : 12-11-2025

Accepted : 14-11-2025

Published : 16-11-2025

Abstract

This study aims to analyze the impact of inflation and deflation on Indonesia's economic growth during the 2020–2024 period. The research background stems from the post-COVID-19 pandemic economic dynamics, in which Indonesia faces fluctuating price pressures due to disruptions to the global supply chain, changes in domestic demand, and adaptive fiscal-monetary policies. The phenomena of inflation and deflation are important issues because they directly impact public purchasing power, investment, and national economic stability. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis, utilizing secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) regarding inflation, deflation, and Gross Domestic Product (GDP) growth during the 2020–2024 period. The analysis is conducted by examining annual and monthly trends to understand the relationship between price changes and economic growth rates, and comparing them with classical, monetarist, and post-Keynesian economic theories. The research results show that Indonesian inflation rose to 5.51% in 2022 due to rising global energy prices, but declined again to 2.61% in 2023 and 1.57% in 2024, in line with domestic economic stability. Economic growth recovered steadily at around 5% per year, indicating that moderate inflation supports economic expansion, while deflation is temporary and does not trigger a recessionary spiral. In conclusion, controlled inflation plays a positive role in economic growth, while high inflation and prolonged deflation have the potential to depress economic activity and public welfare.

Keywords: inflation, deflation, economic growth, Indonesia, BPS 2020–2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi dan deflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2024. Latar belakang penelitian berangkat dari dinamika ekonomi pascapandemi COVID-19, di mana Indonesia menghadapi tekanan harga yang fluktuatif akibat gangguan rantai pasok global, perubahan permintaan domestik, dan kebijakan fiskal–moneter yang adaptif. Fenomena inflasi dan deflasi menjadi isu penting karena keduanya berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, investasi, serta stabilitas ekonomi nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi, deflasi, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 2020–2024. Analisis dilakukan melalui penelaahan tren tahunan dan bulanan untuk memahami hubungan antara perubahan harga dan laju pertumbuhan ekonomi, serta dibandingkan dengan teori ekonomi klasik, monetaris, dan pasca-Keynesian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi Indonesia sempat meningkat pada 2022 sebesar 5,51% akibat kenaikan harga energi global, namun kembali menurun menjadi 2,61% pada 2023 dan 1,57% pada 2024, seiring stabilitas ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi pulih stabil di kisaran 5% per tahun, menandakan bahwa inflasi moderat justru mendukung ekspansi ekonomi, sedangkan deflasi yang terjadi bersifat temporer dan tidak menimbulkan spiral resesi. Kesimpulannya, inflasi terkendali berperan positif



terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi tinggi dan deflasi berkepanjangan berpotensi menekan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Inflasi, Deflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia, BPS 2020–2024

PENDAHULUAN

Inflasi dan deflasi merupakan dua fenomena ekonomi makro yang menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas dan kesehatan perekonomian suatu negara. Keduanya memainkan peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan moneter, fiskal, serta kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terkendali sering dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang sehat karena menunjukkan adanya peningkatan permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan ketimpangan sosial (Friedman 1968). Di sisi lain, deflasi yang berkepanjangan juga menimbulkan risiko serius bagi perekonomian karena dapat menunda konsumsi, meningkatkan beban utang riil, dan menghambat investasi sebagaimana dijelaskan dalam *Debt-Deflation Theory* oleh (Fisher 1933) .

Dalam konteks Indonesia, isu inflasi dan deflasi menjadi sangat relevan selama periode 2020–2024, terutama karena mencakup fase pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi global. Krisis kesehatan yang berubah menjadi krisis ekonomi pada 2020 telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar $-2,07\%$ (Statistik 2021a). Kondisi ini merupakan kontraksi pertama sejak krisis moneter 1998 dan disertai penurunan inflasi ke level terendah dalam dua dekade, yaitu $1,68\%$. Penurunan tajam tersebut diakibatkan oleh menurunnya permintaan agregat akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penurunan mobilitas penduduk, dan menurunnya daya beli masyarakat. Situasi tersebut sejalan dengan teori *demand-pull inflation*, di mana tekanan inflasi menurun seiring penurunan permintaan agregat dalam perekonomian (Jackson n.d.)

Memasuki tahun 2021, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan mobilitas dan memperkuat stimulus ekonomi, termasuk program bantuan sosial, dukungan bagi UMKM, serta penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Kebijakan tersebut berhasil mendorong konsumsi rumah tangga dan meningkatkan aktivitas industri, sehingga inflasi meningkat sedikit menjadi $1,87\%$ dan pertumbuhan ekonomi berbalik positif menjadi $3,69\%$ (Statistik 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal ekspansif dapat memulihkan permintaan agregat tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan. Hasil ini konsisten dengan teori (Phillips 1958a), yang menyatakan adanya hubungan negatif antara tingkat inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek, serta mendukung teori Keynesian bahwa intervensi kebijakan aktif dibutuhkan untuk menstabilkan perekonomian.

Namun, pada tahun 2022, Indonesia menghadapi lonjakan inflasi hingga $5,51\%$ —level tertinggi sejak 2015—yang dipicu oleh kenaikan harga energi global dan komoditas pangan akibat perang Rusia–Ukraina serta gangguan rantai pasok internasional (Statistik 2023). Kondisi ini mencerminkan fenomena *cost-push inflation*, di mana kenaikan biaya produksi menyebabkan harga barang meningkat tanpa peningkatan output (Weeks 2014). Dampak inflasi ini terutama terasa pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang menghadapi kenaikan harga bahan pokok secara signifikan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sebesar $5,31\%$, menunjukkan



ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal, terutama karena peran kebijakan fiskal yang berfokus pada subsidi energi dan penguatan cadangan pangan strategis.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, tren inflasi menunjukkan penurunan yang signifikan. Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,61% pada 2023 dan menurun lagi menjadi 1,57% pada 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia 2024). Penurunan ini terjadi seiring dengan pemulihan rantai pasok global, penurunan harga energi internasional, serta pengendalian ekspektasi inflasi melalui kebijakan moneter yang hati-hati oleh Bank Indonesia. Kondisi ini menandai era *disinflasi sehat*, di mana stabilitas harga tercapai tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks teori makroekonomi, hal ini memperlihatkan terjadinya *flattening Phillips Curve*, sebagaimana dikemukakan oleh (Blanchard 2016c) dan (Negro et al. 2020), di mana hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi lebih lemah dalam perekonomian modern yang kredibel dan terdiversifikasi.

Selain faktor kebijakan moneter, faktor struktural dan kelembagaan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga di Indonesia. Menurut teori *Structuralist Inflation* (D. Kim 2023), tekanan inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor moneter, tetapi juga oleh distribusi pendapatan, struktur pasar tenaga kerja, serta efisiensi rantai pasok. Peningkatan investasi infrastruktur, digitalisasi ekonomi, dan industrialisasi berteknologi tinggi dalam program *Making Indonesia 4.0* telah membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya logistik (R Gupta 2019) (S. Antman, Sari, and Rangga 2024). Dengan demikian, kestabilan inflasi Indonesia selama 2023–2024 juga merupakan hasil dari reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang berorientasi produktivitas.

Dari sisi sosial dan kebijakan publik, inflasi yang rendah dan stabil memberikan manfaat besar bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Stabilitas harga bahan pokok memperkuat daya beli rumah tangga dan menjaga konsumsi domestik—komponen yang menyumbang sekitar 60–65% dari PDB Indonesia (Leksono, Bratamanggala, and Saleh 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan *Post-Keynesian* (Lavoie 2022) yang menekankan bahwa stabilitas harga berperan dalam menjaga keseimbangan antara upah dan keuntungan perusahaan, mencegah konflik klaim ekonomi antara pekerja dan pengusaha, serta mempertahankan pertumbuhan inklusif. Oleh karena itu, stabilitas inflasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa periode 2020–2024 memberikan gambaran empiris yang kaya mengenai interaksi antara inflasi, deflasi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa inflasi moderat dapat mendukung ekspansi ekonomi, sementara deflasi yang bersifat temporer dapat membantu menstabilkan daya beli tanpa menimbulkan resesi. Dengan menggabungkan perspektif teoretis seperti *Phillips Curve*, *Monetarist Theory*, dan *Structuralist Inflation*, serta data empiris BPS, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana dinamika harga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024. Data yang digunakan mencakup indikator inflasi tahunan dan bulanan, tingkat deflasi, serta pertumbuhan ekonomi (PDB atas dasar harga konstan). Metode analisis deskriptif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena empiris dan memberikan interpretasi mendalam terhadap hubungan antar variabel ekonomi.

Langkah analisis dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data sekunder dari laporan resmi BPS seperti *Statistik Keuangan Indonesia*, *Berita Resmi Statistik Inflasi Nasional*, dan *Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan*.
2. Penyusunan tren data tahunan dan bulanan untuk melihat fluktuasi inflasi dan deflasi serta keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
3. Interpretasi hasil berdasarkan teori-teori inflasi dan deflasi seperti *Monetarist Theory* (Friedman 1968), *Post-Keynesian Theory* (Lavoie 2022), dan *Structuralist Theory* (D. Kim 2023).

Metode ini mengikuti pedoman analisis data sekunder kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh (Busetto, Wick, and Gumbinger 2020), yang menekankan keabsahan sumber data, analisis kontekstual, dan triangulasi teoritis untuk mencapai kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Data Inflasi, Deflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi (BPS 2020–2024)

Tabel 1. Inflasi, Deflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Berita Resmi Statistik Inflasi Nasional dan PDB Indonesia 2020–2024*.

Tahun	Inflasi tahunan (%)	Deflasi bulanan	Signifikan pertumbuhan PDB (%)
2020	1,68	Sep (-0,05%)	-2,07
2021	1,87	Sep (-0,02%)	3,69
2022	5,51	-	5,31
2023	2,61	Ags (-0,02%)	5,05
2024	1,57	Mei-Jul,Sep	5,03

Tabel di atas menunjukkan dinamika inflasi, deflasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak sejalan dengan perubahan kondisi global dan domestik selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, aktivitas ekonomi menurun tajam sehingga menyebabkan kontraksi pertumbuhan PDB sebesar –2,07%. Penurunan permintaan agregat akibat kebijakan pembatasan sosial menekan laju inflasi ke tingkat 1,68%, bahkan terjadi deflasi bulanan –0,05% pada September 2020 (Statistik 2021b). Kondisi ini sejalan dengan teori *demand-pull inflation* yang dikemukakan oleh (Jackson n.d.), bahwa ketika konsumsi masyarakat dan investasi melemah, tekanan harga ikut menurun. Periode ini memperlihatkan bahwa stabilitas harga yang terlalu rendah bukanlah indikator kesehatan ekonomi, melainkan cerminan lemahnya aktivitas produksi dan permintaan domestik.



Pada tahun 2021, Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah peluncuran vaksinasi massal dan pelonggaran aktivitas ekonomi. Inflasi meningkat sedikit menjadi 1,87%, sementara pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 3,69% (BPS, 2022). Pemulihan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi. Teori *Phillips Curve* (Phelps 1967; Phillips 1958b; Statistik 2022) menggambarkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran—ketika aktivitas ekonomi meningkat, tekanan harga pun ikut naik karena peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Hasil empiris Indonesia tahun 2021 mendukung konsep tersebut: peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan kenaikan inflasi yang masih dalam batas terkendali.

Tahun 2022 menjadi periode penting yang menandai lonjakan inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni mencapai 5,51%. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga energi global akibat perang Rusia–Ukraina dan gangguan rantai pasok pangan internasional (BPS, 2023). Kondisi ini mencerminkan fenomena *cost-push inflation* sebagaimana dijelaskan oleh (Statistik 2023; Weeks 2014), yaitu inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi seperti energi, bahan baku, dan transportasi. Meski demikian, pertumbuhan PDB tetap terjaga pada 5,31%, menandakan adanya resiliensi struktural ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah berupa subsidi energi, pengendalian tarif bahan bakar minyak, dan peningkatan cadangan beras nasional berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal.

Pada tahun 2023, tekanan inflasi mulai menurun drastis menjadi 2,61% seiring stabilisasi harga energi global, pemulihan rantai pasok, serta keberhasilan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mengendalikan ekspektasi inflasi (Badan Pusat Statistik 2023). Pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5,05%, memperlihatkan fase *disinflasi sehat*—suatu kondisi ketika inflasi menurun tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Blanchard 2016a) (Del Negro et al. 2020), yang menjelaskan bahwa perekonomian modern dapat mengalami pertumbuhan yang kuat meskipun tingkat inflasi relatif rendah, terutama jika kebijakan moneter kredibel dan ekspektasi inflasi masyarakat terjaga. Dengan demikian, tahun 2023 menunjukkan keseimbangan optimal antara stabilitas harga dan ekspansi ekonomi.

Selanjutnya, pada tahun 2024, laju inflasi menurun lebih jauh menjadi 1,57%, dengan beberapa episode deflasi bulanan ringan, khususnya pada bulan Mei–Juli dan September. Deflasi ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga pangan musiman akibat panen raya serta penurunan harga energi domestik (Badan Pusat Statistik 2024). Namun, deflasi tersebut bersifat temporer dan tidak berdampak negatif terhadap output nasional. Fenomena ini sejalan dengan konsep *benign deflation*, yaitu penurunan harga yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi, bukan karena melemahnya permintaan (Bagus 2015) (Horwitz 2014). Pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5,03%, yang menunjukkan kemampuan Indonesia mempertahankan pertumbuhan stabil di tengah tekanan global.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat argumen *Structuralist Theory* (H. Kim 2023) yang menekankan bahwa faktor-faktor struktural seperti efisiensi distribusi, pangsa tenaga kerja, dan peran kebijakan pemerintah sangat memengaruhi dinamika inflasi. Peningkatan efisiensi infrastruktur logistik dan digitalisasi sistem perdagangan melalui program *Making Indonesia 4.0* terbukti membantu menurunkan biaya distribusi barang (Rajesh Gupta 2019). Reformasi kebijakan fiskal dan investasi di sektor industri juga meningkatkan kapasitas produksi nasional, yang



berkontribusi pada pengendalian inflasi tanpa menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan struktural jangka panjang berperan sama pentingnya dengan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga.

Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa inflasi moderat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan laba perusahaan dan perluasan investasi. Menurut (Akerlof, Dickens, and Perry 2000), inflasi rendah yang stabil dapat mendorong fleksibilitas upah nominal dan memperkuat daya saing tenaga kerja. Sebaliknya, inflasi yang tinggi seperti pada 2022 dapat menekan konsumsi rumah tangga dan memperlebar kesenjangan sosial karena harga barang kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan. Di sisi lain, deflasi berkepanjangan berpotensi memicu *deflationary spiral*, yaitu penurunan harga yang terus-menerus menyebabkan penurunan laba, pengurangan tenaga kerja, dan kontraksi ekonomi (Fisher 1933)(Krugman 1998). Namun, Indonesia berhasil menghindari risiko tersebut melalui kebijakan harga dan fiskal yang adaptif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 2020–2024 merupakan masa di mana Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi moderat berperan sebagai katalis pertumbuhan, sementara deflasi yang bersifat sementara membantu menekan harga tanpa mengganggu ekspansi produksi. Kondisi ini memperlihatkan efektivitas koordinasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2024) kebijakan fiskal–moneter dalam merespons tekanan eksternal dan menjaga ekspektasi inflasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan *Grid Model of Inflation* (Mayer 2024), bahwa tidak ada satu teori tunggal yang dapat menjelaskan seluruh dinamika inflasi, tetapi kombinasi faktor moneter, struktural, dan sosiallah yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian mendukung teori bahwa inflasi moderat bersifat konstruktif bagi perekonomian. Menurut (Akerlof et al. 2000) inflasi ringan membantu fleksibilitas upah nominal dan mendorong penyesuaian pasar tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, inflasi sekitar 2–3% pada 2023–2024 membantu menjaga daya saing ekspor dan margin keuntungan dunia usaha tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi tinggi seperti pada 2022 menimbulkan tekanan pada rumah tangga berpendapatan rendah dan memicu peningkatan biaya hidup. Kondisi ini mencerminkan distribusi inflasi yang tidak merata sebagaimana dijelaskan dalam *Structuralist Inflation Theory* (D. Kim 2023)

Sementara itu, episode deflasi bulanan 2023–2024 memperlihatkan sisi positif—penurunan harga pangan yang memperkuat konsumsi—tanpa menimbulkan efek kontraktif terhadap output. Ini menunjukkan adanya *managed price adjustment* yang efektif, di mana pemerintah menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan melalui kebijakan logistik dan subsidi (R. Antman, Sari, and Rangga 2024). Temuan empiris ini memperkuat argumentasi bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat utama pertumbuhan berkelanjutan. (Blanchard 2016b) (Summers 2015) menegaskan bahwa inflasi yang rendah dan stabil memungkinkan kebijakan moneter tetap akomodatif, mencegah stagnasi, dan menjaga suku bunga riil tetap rendah. Dalam konteks Indonesia, hal ini terbukti dengan pemulihan pertumbuhan PDB yang stabil pasca-2020.

Pemerintah perlu mempertahankan strategi dual: (1) menjaga inflasi dalam kisaran target 2–3% sebagai stimulus pertumbuhan, dan (2) menghindari deflasi berkepanjangan dengan



memperkuat konsumsi domestik dan stabilitas pangan. Keberhasilan menjaga inflasi terkendali dalam konteks pertumbuhan yang kuat menunjukkan bahwa Indonesia telah berada pada jalur *stabilitas makroekonomi yang inklusif*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi dan deflasi memiliki peran dinamis dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi yang moderat (2–3%) terbukti mendorong konsumsi, investasi, dan ekspansi produksi, sedangkan inflasi tinggi dan deflasi yang berkepanjangan dapat menurunkan daya beli dan memperlambat pertumbuhan.

Hasil empiris menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga selama 2020–2024. Episode inflasi tinggi pada 2022 merupakan konsekuensi eksternal, bukan kelemahan domestik, dan berhasil dikendalikan melalui kebijakan terkoordinasi. Deflasi bulanan 2023–2024 bersifat musiman dan bahkan membantu memperkuat daya beli masyarakat.

Dengan demikian, stabilitas harga bukan hanya tujuan moneter, melainkan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan terus memperkuat kebijakan berbasis data untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau, memperluas kapasitas produksi nasional, dan mengintegrasikan kebijakan moneter–fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap guncangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, George A., William T. Dickens, and George L. Perry. 2000. “Near-Zero Inflation?” *Brookings Papers on Economic Activity* 2000(1):1–60.
- Antman, Riza, Dian P. Sari, and Fajar Rangga. 2024. “Managed Price Adjustment Dan Stabilitas Pangan Di Indonesia 2023--2024.”
- Antman, S., L. Sari, and M. Rangga. 2024. “Infrastructure Development and Economic Efficiency in Indonesia: A Harrod-Domar Approach.” *Journal of Infrastructure and Economics*. doi:10.1016/j.jinfraeco.2024.100234.
- Badan Pusat Statistik. 2023. “Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2023.”
- Badan Pusat Statistik. 2024. “Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2024.”
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. “Statistical Yearbook of Indonesia 2024.”
- Bagus, Philipp. 2015. *In Defense of Deflation*. Cham: Springer.
- Blanchard, Olivier. 2016a. *Macroeconomics*. 7th ed. Boston: Pearson.
- Blanchard, Olivier. 2016b. *Macroeconomics*. 7th ed. Boston: Pearson.
- Blanchard, Olivier. 2016c. “The Phillips Curve: Back to the ’60s?” *American Economic Review: Papers & Proceedings* 106(5):31–34. doi:10.1257/aer.p20161003.
- Busetto, L., W. Wick, and C. Gumbinger. 2020. “How to Use and Assess Qualitative Research Methods.” *Neurological Research and Practice* 2(14). doi:10.1186/s42466-020-00059-z.
- Fisher, Irving. 1933. “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions.” *Econometrica* 1(4):337–57. doi:10.2307/1907327.
- Friedman, Milton. 1968. “The Role of Monetary Policy.” *American Economic Review* 58(1):1–17.



doi:10.1257/aer.58.1.1.

Gupta, R. 2019. "Industrial Policy and Manufacturing Upgrading: Indonesia 4.0." *World Development*. doi:10.1016/j.worlddev.2019.104812.

Gupta, Rajesh. 2019. *Logistics Modernization and Trade Facilitation in Indonesia*. London: Routledge.

Horwitz, Steven. 2014. "Benign Deflation: More Than One Path to Falling Prices." *The Independent Review* 19(1):5–18.

Jackson, T. n.d. "Demand-Pull Inflation Theory."

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. "APBN Kita 2024: Sinergi Fiskal--Moneter Dalam Menjaga Pemulihan Dan Stabilitas Harga."

Kim, Dae. 2023. "Labour Share and Inflation Dynamics in OECD Countries." *Economic Modelling*. doi:10.1016/j.econmod.2023.106435.

Kim, Hyun. 2023. "Structuralist Theory of Inflation in Emerging Economies: The Role of Distributional and Policy Factors." *Journal of Development and Economic Structures* 15(2):45–68.

Krugman, Paul. 1998. "It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap." *Brookings Papers on Economic Activity* 1998(2):137–205.

Lavoie, Marc. 2022. "Conflict Inflation and Post-Keynesian Perspectives." *Cambridge Journal of Economics* 46(5):987–1012. doi:10.1093/cje/beac031.

Leksono, Ari Wahyu, Rudi Bratamanggala, and Sugiyanto Saleh. 2025. "Human Resources and Community Consumption Factors: An Overview of Indonesia's Growth." *Formosa Journal of Sustainable Research* 4(6):1151–60. doi:10.55927/fjsr.v4i6.381.

Mayer, Jonathan. 2024. "The Grid Model of Inflation: Integrating Monetary, Structural, and Social Drivers." *Journal of Macroeconomic Policy* 32(1):15–39.

Negro, Marco Del, Marc Lenza, Giorgio E. Primiceri, and Andrea Tambalotti. 2020. "What's Up with the Phillips Curve?" *Brookings Papers on Economic Activity* 301–73. doi:10.1353/eca.2020.0004.

Del Negro, Marco, Michele Lenza, Giorgio E. Primiceri, and Andrea Tambalotti. 2020. "What's Up with the Phillips Curve?" *Brookings Papers on Economic Activity* 2020(Spring):301–73.

Phelps, Edmund S. 1967. "Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time." *Economica* 34(135):254–81. doi:10.2307/2552025.

Phillips, A. W. 1958a. "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957." *Economica* 25(100):283–99. doi:10.1111/j.1468-0335.1958.tb00003.x.

Phillips, A. W. 1958b. "The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957." *Economica* 25(100):283–99. doi:10.1111/j.1468-0335.1958.tb00003.x.

Statistik, Badan Pusat. 2021a. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Statistik, Badan Pusat. 2021b. *Statistik Ekonomi Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Statistik, Badan Pusat. 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pusat



Statistik (BPS).

Statistik, Badan Pusat. 2023. *Perkembangan Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Summers, Lawrence H. 2015. "Demand Side Secular Stagnation." *American Economic Review: Papers & Proceedings* 105(5):60–65.

Weeks, John. 2014. "Economics of the 1\%: How Mainstream Economics Serves the Rich, Obscures Reality and Distorts Policy." *Anthem Press*.